

Alasan Masyarakat Bumiputera Malaysia Melakukan Penolakan Terhadap Ratifikasi ICERD di Malaysia pada Tahun 2018

Aina Sanggita Chandra¹⁾, I Made Anom Wiranata²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dibalik penolakan masyarakat Bumiputera Malaysia terhadap *International Convention on the Elimination of Racial Discrimination* (ICERD) di Malaysia pada tahun 2018 menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan kerangka konseptual politik identitas, identitas etnis, dan primordialisme. Ketiga konsep digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan peran etnis dalam pembentukan politik identitas, konsep identitas etnis dalam pembentukan masyarakat, dan konsep primordialisme di masyarakat dibalik fenomena penolakan ratifikasi konvensi yang terjadi pada tahun 2018 di Malaysia. Primordialisme yang merupakan sebuah konsep yang membentuk masyarakat dan membentuk sebuah solidaritas kelompok yang mengikat individu baik berdasarkan hubungan genetik, kesamaan budaya baik dalam bahasa, agama, wilayah dan juga kekerabatan ada di masyarakat menjadi salah satu faktor yang kuat bagi masyarakat Melayu Malaysia atau yang dikenal sebagai *Bumiputera* untuk menolak ratifikasi yang ada karena isi konvensi yang bertentangan dengan konstitusi yang selama ini diterapkan dan dilestarikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menganalisis alasan dibalik terwujudnya politik identitas yang berasal dari identitas etnis dan akar primordialisme di masyarakat yang pada akhirnya menjadi alasan utama dari penolakan yang ada oleh Malaysia sebagai sebuah negara.

Kata-kunci : Bumiputera, ICERD, Identitas Etnis, Politik Identitas, Primordialisme.

Abstract

This research aims to analyze the reasons behind the rejection of the Malaysian Bumiputera Community towards the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) in Malaysia in 2018 using a qualitative-descriptive research method with the conceptual framework of identity politics, ethnic identity, and primordialism. The three concepts are used in this study to explain the role of ethnicity in the formation of identity politics, the concept of ethnic identity in the formation of society, and the concept of primordialism in society behind the phenomenon of refusal to ratify the convention that occurred in 2018 in Malaysia. Primordialism, which is a concept that shapes society and forms a group solidarity that binds individuals based on genetic relationships, cultural similarities in language, religion, region and also kinship in society, is one of the strong factors for the Malaysian Malay community or known as Bumiputera to reject the existing ratification because the contents of the convention are contrary to the constitution that has been implemented and preserved by both the government and society. This research analyzes the reasons behind

the realization of identity politics derived from ethnic identity and the roots of primordialism in society which ultimately became the main reason for the rejection by Malaysia as a country.

Keywords : *Bumiputera, Ethnic Identity, ICERD, Identity Politics, Primordialism*

Kontak Penulis

Aina Sanggita Chandra

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jalan P.B. Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali, 80234

Telp: +6281295443603

E-mail : ainasanggita13@gmail.com

PENDAHULUAN

Malaysia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang berasal dari berbagai macam etnis merupakan negara demokrasi yang diketahui belum melakukan ratifikasi terhadap *International Convention on the Elimination of Racial Discrimination* (ICERD) yang merupakan konvensi mengenai penghapusan berbagai bentuk diskriminasi rasial yang terjadi di dalam masyarakat. Pada tahun 2018, penolakan tersebut dituangkan melalui demonstrasi damai sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat yang menolak hal tersebut. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengenai alasan dibalik penolakan salah satu negara demokrasi terhadap ratifikasi konvensi yang cukup dijunjung oleh negara-negara demokrasi lainnya sebagai bentuk penegakkan hak asasi manusia tidak hanya dalam tingkat nasional, tapi juga universal.

Sejarah yang panjang masyarakat Malaysia dalam mencapai kemerdekaannya menjadi alasan utama adanya penolakan ratifikasi ICERD didorong dengan kebijakan pemerintah yang ada dalam mendorong kebijakan afirmatif di dalam negara. Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi yang mengakui kesetaraan hak asasi manusia namun dalam praktik di dalam masyarakat, diskriminasi masih dapat ditemukan secara nyata di antara kehidupan bersosial. Hal ini mendorong masyarakat minoritas di dalam negara untuk melakukan perubahan, selain itu organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga mengusulkan ratifikasi ICERD di Malaysia sebagai bentuk perwujudan kebebasan hak asasi manusia baik individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat oleh masyarakat Melayu asli Malaysia yang kemudian dikenal sebagai masyarakat Bumiputera yang berpendapat bahwa adanya ratifikasi ICERD merupakan bentuk penghapusan hak istimewa yang selama ini mereka miliki sebagai masyarakat asli.

Kekhawatiran masyarakat Bumiputera yang pada akhirnya terwujud dalam penolakan

terhadap ratifikasi ICERD tentu bukan merupakan hal yang tidak berdasar, banyak faktor yang kemudian menjadi alasan-alasan kuat yang mendorong terjadinya penolakan ratifikasi tersebut oleh masyarakat. Peran dari etnis atau kelompok ras tertentu dalam masyarakat sosial menjadi faktor yang menentukan pengambilan keputusan oleh masyarakat untuk mendorong pemerintah untuk menolak usulan ratifikasi ICERD pada tahun 2018. Selain itu, politik identitas memiliki perannya sendiri dalam memperkuat apa yang masyarakat percaya dan yakini sebagai hal yang memang berhak mereka pertahankan sebagai ras atau etnis tertentu dalam suatu masyarakat.

Penolakan ratifikasi ICERD yang dilakukan masyarakat merupakan hal yang berasal dari kebijakan dengan tujuan untuk menyetarakan kondisi masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, atau bahkan agama dari individu maupun kelompok tertentu. Kebijakan afirmatif yang merupakan kebijakan dengan tujuan menghapuskan diskriminasi dan meningkatkan persatuan di dalam masyarakat pada praktiknya di menimbulkan diskriminasi lainnya yang semakin dilestarikan hingga masa kini. Diskriminasi tersebut lambat laun berubah menjadi suatu hal yang dianggap “normal” dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, sehingga saat sebuah perubahan datang, hal itu dianggap menjadi sebuah ancaman bagi kelompok tersebut, yang dalam penelitian ini digambarkan oleh masyarakat Bumiputera Malaysia.

Dalam penelitian mengenai alasan penolakan masyarakat Bumiputera Malaysia terhadap ratifikasi ICERD, peneliti menggunakan empat tulisan yang membahas konsep mengenai kebijakan afirmatif, primordialisme, dan identitas sosial sebagai tinjauan pustaka. Tulisan pertama yang berjudul *Primordialisme dalam Hubungan Transnasional: Peran Identitas Dalam Mendorong Arus Pengungsi Suriah ke Lebanon 2011-2014* (2016). Dalam tulisannya, Ramaditya memaparkan peran dari identitas etnis dalam pengambilan keputusan dibalik pilihan

pengungsi Suriah untuk menjadikan Lebanon sebagai tempat tujuan mereka. Identitas etnis memiliki peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Pilihan yang mungkin dianggap tidak rasional tersebut merupakan sebuah hasil keputusan yang telah didasari oleh pertimbangan non-rasional dengan peran identitas etnis yang sudah terkonstruksi di dalam masyarakat karena secara disadari atau tidak, kedua negara tersebut memiliki keterikatan yang menyebabkan kedua negara tersebut memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi peristiwa yang berlangsung pada saat itu. Adanya *sense of belonging* (2016) di antara kedua negara kemudian menciptakan dan memperkuat rasa keterikatan maupun rasa memiliki di dalam masyarakat yang kemudian menjadi landasan dalam diambilnya keputusan akhir dalam suatu kelompok. Selain identitas etnis, primordialisme juga dianggap memiliki kontribusi dalam pengambilan keputusan oleh otoritas maupun masyarakat karena adanya preferensi untuk mempertahankan hal atau menerima hal yang dapat diterima di dalam kelompok.

Tulisan kedua merupakan tulisan milik Dela Karisma (2020) yang berjudul *Kebijakan Afirmatif di Malaysia: Analisis Idiosinkretis Penolakan Mahathir Mohamad untuk Meratifikasi ICERD*. Teori yang digunakan oleh Karisma dalam tulisannya mengambil teori milik Juliet Kaarbo (1997) yang menjelaskan mengenai lima elemen untuk menganalisis gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil. Dalam penelitiannya Dela Karisma (2020) menekankan mengenai alasan penolakan masyarakat Bumiputera dalam meratifikasi ICERD dikarenakan adanya pengaruh pengambilan keputusan yang dilatarbelakangi oleh keputusan pemangku kebijakan, yang pada saat itu dipimpin oleh perdana menteri Mahathir Mohamad.

Tulisan ketiga merupakan tulisan milik Hwok Aun-Lee (2017) yang berjudul *Majority Affirmative Action in Malaysia: Imperatives, Compromises and Challenges*. Dalam tulisannya, Lee membahas mengenai kebijakan afirmatif di

dalam negara yang dibentuk melalui pluralisme dan juga keterlibatan negara. Politik yang ada di dalam negara kemudian dianggap sebagai sebuah hal yang dibingkai sedemikian rupa berdasarkan garis etnis yang mewakili kepentingan setiap kelompok yang ada (2017). Tulisan milik Lee berfokus pada alasan terbentuknya kebijakan afirmatif di dalam negara yang berasal dari sejarah panjang pluralisme yang ada. Kemunculan dari kebijakan afirmatif yang dibentuk pemerintah dengan harapan dapat meredakan kesenjangan dan konflik yang ada justru menimbulkan isu diskriminasi lainnya yang terus berlangsung hingga puluhan tahun lamanya.

Tulisan terakhir merupakan tulisan milik Suyatno Ladiqi dan Aizatul Anis Binti Zuhari (2019) yang berjudul *Malay Rejection on Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Ladiqi dan Zuhari membahas mengenai pro dan kontra mengenai ratifikasi ICERD bagi masyarakat Malaysia yang percaya mengenai konsep Ketuanan Melayu sebagai sebuah konsep politik yang paling baik yang dapat diterapkan oleh pemerintah di dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan peran penting dari Ketuanan Melayu dalam mendorong lahirnya hak-hak istimewa yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bumiputera Malaysia hingga saat ini. Selain konsep Ketuanan Melayu, tulisan ini juga menjelaskan mengenai bagaimana agama dan kontrak sosial yang ada di dalam masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendukung yang kuat dalam penolakan ratifikasi ICERD yang dilakukan negara.

Satu di antara keempat tulisan tersebut menjelaskan mengenai konsep identitas etnis dan primordialisme yang diterapkan di suatu negara, sedangkan tiga tulisan lainnya menjelaskan alasan penolakan ratifikasi ICERD dari sudut pandang berbeda yaitu Idiosinkretis, Pluralisme dan juga Kontrak Sosial yang ada di dalam negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Politik Identitas, Identitas Etnis dan juga Primordialisme dalam menjelaskan alasan dibalik penolakan masyarakat Bumiputera dalam meratifikasi ICERD pada tahun 2018.

Masyarakat Bumiputera sebagai salah satu kelompok masyarakat dominan di dalam negara cenderung berfokus pada kepentingan kelompok masyarakat mereka yaitu kesejahteraan. Hal ini kemudian dapat dicapai dengan adanya politik identitas. Politik identitas sendiri oleh Wiarda (2014) didefinisikan sebagai sikap atau posisi politik yang berfokus pada kepentingan suatu kelompok dalam masyarakat, sehingga hal ini mengacu pada pencarian status yang didasarkan oleh kategori tertentu, salah satunya adalah ras. Konsep identitas etnis, politik identitas dan primordialisme dapat dianggap sebagai sebuah konsep yang saling berkaitan dikarenakan hal-hal tersebut memengaruhi kebijakan afirmatif yang berlangsung di dalam negara dan mendorong keberadaan masyarakat Bumiputera sebagai ras yang dominan dan memiliki keistimewaan berdasarkan kebijakan yang berlaku memiliki posisi politik yang diuntungkan karena sebagai kelompok yang dominan, masyarakat Bumiputera lebih leluasa untuk mengamankan kedudukan mereka dengan perlindungan dari kebijakan yang berlaku di dalam masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami masalah sosial berupa alasan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Bumiputera terhadap ratifikasi ICERD yang dilakukan pada tahun 2018 secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan sosial yang terjadi. Sumber data yang kemudian digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa dokumen hasil penelitian, artikel berita elektronik, peraturan negara, laporan organisasi terkait, dan jurnal.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan masyarakat Bumiputera Malaysia sebagai kelompok kepentingan yang memiliki alasan dalam melakukan penolakan ratifikasi ICERD pada tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

New Economic Policy (NEP)

New Economic Policy (NEP) atau Kebijakan Ekonomi Baru merupakan sebuah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan memerangi kemiskinan dengan restrukturisasi untuk menghindari kesenjangan tanpa adanya klasifikasi ras tertentu dalam penerapannya. Keberadaan dari NEP memberikan kesempatan bagi masyarakat Melayu pada awal kebijakan tersebut diberlakukan untuk dapat mengejar jurang ketertinggalan yang dialami masyarakat Melayu pasca kemerdekaan khususnya dalam bidang ekonomi. Kesuksesan penerapan NEP lambat laun mengalami perubahan dikarenakan adanya intervensi oleh pemerintah khususnya pada bidang ekonomi sehingga muncul kebijakan istimewa yang berlaku bagi masyarakat Melayu yang kemudian dikenal sebagai masyarakat Bumiputera. Kebijakan ini terus menerus mendorong masyarakat Bumiputera untuk terus mencapai kesejahteraan meskipun kesetaraan yang menjadi tujuan awal dari kebijakan ini telah tercapai. Kesenjangan lainnya tidak dapat dihindari karena fokus kebijakan yang mengistimewakan salah satu ras tertentu menimbulkan pertanyaan lainnya mengenai absennya tujuan awal dari NEP sebagai kebijakan yang menghapuskan kesenjangan di dalam masyarakat.

Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif muncul sebagai alat untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengalami kesenjangan ekonomi lambat laun kehilangan tujuannya karena keberadaan yang tetap berlanjut meskipun tujuan untuk mencapai kesetaraan telah tercapai. Tujuan untuk memastikan bahwa tidak adanya diskriminasi di dalam masyarakat telah berubah menjadi sebuah bentuk kebijakan yang mendiskriminasi ras minoritas di dalam masyarakat karena mulai terhapusnya tujuan

awal dari terbentuknya kebijakan tersebut. Narasi yang mendorong satu kelompok tertentu sebagai sebuah kelompok yang dominan di dalam masyarakat sehingga kemunculan legitimasi mengenai kepercayaan bahwa masyarakat yang mendominasi berhak mendapatkan kesejahteraan di atas ras lainnya.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)

Konvensi ICERD sebagai instrumen hukum internasional yang khusus membahas masalah komprehensif diskriminasi sosial memungkinkan negara-negara yang meratifikasi konvensinya memiliki peraturannya dalam membuat perbedaan, pengecualian, pembatasan maupun preferensi antara warga negara maupun mereka yang bukan bagian dari negara. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan ICERD di dalam suatu negara tidak akan mempengaruhi undang-undang tentang kewarganegaraan maupun kebangsaan sebuah negara selama peraturan yang ada tidak mendiskriminasi pihak maupun kelompok tertentu. ICERD mengikat negara-negara yang berpartisipasi dalam ratifikasi dengan kewajiban untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat baik otoritas publik, lembaga publik, baik tingkat nasional maupun lokal tidak turut terlibat dalam praktik diskriminasi di masyarakat. Hal ini menjadikan ICERD sebagai instrumen yang dapat mengikat dan memiliki tujuan yang jelas untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial, meskipun tujuan tersebut tidak selamanya dapat berjalan bersamaan dengan kebijakan yang ada di dalam suatu negara.

PENUTUP

Penolakan ratifikasi ICERD yang terjadi pada tahun 2018 didasari oleh beberapa faktor yang memperkuat alasan masyarakat untuk menolak adanya ratifikasi oleh pemerintahan, dalam penelitian ini, dari penjabaran yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menemukan beberapa faktor utama yang mendorong

penolakan tersebut, diantaranya yang pertama yaitu Politik identitas yang kuat di dalam negara dan sudah diterapkan di dalam masyarakat sejak lama yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan afirmatif dalam bentuk kebijakan politik yang mengutamakan ras tertentu, dalam hal ini kebijakan politik yang menguntungkan masyarakat Bumiputera yang sampai saat ini tetap berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan tetap dilestarikan selama puluhan tahun. Selanjutnya, adanya Primordialisme sebagai bagian dari kuatnya identitas etnis di dalam negara yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mendorong ras tertentu tetap berada di atas ras lainnya, diwujudkan dengan konstitusi negara yang memberikan hak Istimewa kepada masyarakat Bumiputera, tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga pendidikan dan agama, lalu yang terakhir dan menjadi dorongan paling kuat pada penolakan yang berlangsung adalah adanya kekhawatiran kehilangan hak Istimewa yang selama ini dimiliki masyarakat sebagai bagian dari ras mayoritas di dalam negara karena ratifikasi dari konvensi ICERD dianggap bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan di dalam negara.

Banyak faktor yang mendorong penolakan ratifikasi ICERD oleh masyarakat Bumiputera yang pada akhirnya mendorong pemerintah mengambil keputusan untuk tidak meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2018. ICERD dikhawatirkan akan mengurangi bahkan menghapuskan hak istimewa yang selama ini diterima masyarakat Bumiputera sebagai masyarakat asli dari Malaysia. Penghapusan segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam bentuk kebijakan afirmatif yang diterapkan negara menjadi salah satu hal yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah jika konvensi tersebut memang diadaptasi di dalam negara. Berbagai penolakan bermunculan karena bagi masyarakat hal tersebut mengancam dan menyebabkan masyarakat kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Alasan tersebut yang kemudian mendorong masyarakat melakukan penolakan terhadap ratifikasi ICERD pada tahun 2018.

Daftar Pustaka

Buku:

- Barlow, C., & Loh, F. K. (2003). *Malaysian Economics and Politics in The New Century*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Bozonelos, D., Wendt, J., Lee, C., Scarffe, J., Omae, M., Josh, F., . . . Veldhuis, S. (2022). *Comparative Government and Politics. Introduction to Political Identity*, pp. 1-4.
- Charmaz, K. (2001). Grounded Theory: Methodology and Theory Construction. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 6396-6399.
- Coakley, J. (2017). *Primordialism in Nationalism Studies: Theory or Ideology? Nations and Nationalism*, 1-21.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2020). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. In J. W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Nebraska: Pearson.
- Hegel, G. W. (2012). *Hegel's Philosophy of Mind*. Oxford.
- Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic Group in Conflict*. Los Angeles: University of California Press.
- Hutchinson, J., & Smith, A. D. (1996). *Ethnicity*. Oxford University Press.
- Jomo, K., & Wong, S. N. (2003). *Law, Institutions, and Malaysian Economic Development*. Singapore: Nus Press.
- Kaarbo, J. (1997). *Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy Decision-Making: A Framework for Research*. *Political Psychology* Vol. 18, 553-581.
- KOMAS, P. (2018). *Malaysia Racial Discrimination Report 2017*.
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2015). *Practical Research: Planning and Design*. England: Pearson Education Limited.
- Lewis-Beck, M., Bryman, A. E., & Liao, T. F. (2004). *The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods*. California: SAGE Publications.
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tajfel, H., & Turner, J. (1986). *The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour*. Chicago: Hall Publisher.
- Wiarda, H. J. (2014). *Political Culture, Political Science, and Identity Politics*. Burlington: Ashgate Publishing Limited.

Jurnal Artikel:

- Hwok-Aun, L. (2021). *Fifty Years of Malaysia's New Economic Policy: Three Chapters with No Conclusion*. Economics Working Paper.
- Ibrahim, W. Z. (2021). *The New Economic Policy and Contesting Bumiputera Identity Among Orang Asli and the Indigenous Peoples of Sabah and Sarawak*.
- Jayasooria, D. (2020). *Understanding ICERD: In The Wider Context of The Federal Institution, Human Rights and Malaysian Society*. Malaysia: United Nations.
- Karisma, D. (2020). *Kebijakan Afirmatif di Malaysia: Analisis Idiosinkretis Penolakan Mahathir Mohamad untuk Meratifikasi ICERD*. *Journal of International Relations*, Volume 6, 211-219.
- Ladiqi, S., & Zuhari, A. A. (2019). *Malay Rejection of All Forms of Racial Discrimination*.
- Leach, C. W., Brown, L. M., & Worden, R. E. (2008). *Ethnicity and Identity Politics*. Elsevier.
- Lee, H.-A. (2017). *Majority Affirmative Action in Malaysia: Imperatives, Compromises and Challenges*.

- Muda, K., Muslim, N., Tohar, S. N., & Idris, F. (2021). *International Journal of Academic Research In Business & Social Sciences. The Social Contract or Traditional Elements in the Federal Constitution of Malaysia: An Analysis of its Application*, 1001-1017.
- Pratama, R. A. (2016). Primordialisme Dalam Hubungan Transnasional: Peran Identitas Dalam Mendorong Arus Pengungsi Suriah ke Lebanon, 2011-2014. *Journal of International Relations*, Volume 2, 84-95.
- Walsh, B. (2020). *Malaysia's Political Polarization: Race, Religion, and Reform*. In B. Walsh, *Political Polarization In South and Southeast Asia: Old Division, New Dangers* (pp. 41-52). Carnegie Endowment For International Peace.
- Internet:**
- Article 153 Of The Constitution Of Malaysia*. (2023). Tersedia di: <https://academic-accelerator.com/encyclopedia/article-153-of-the-constitution-of-malaysia> Diakses tanggal 20 September 2023.
- Bloomberg. (2018). *Mahathir urges Malays, bumiputeras to work harder as opposition stages racial rally*. Tersedia di: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/mahathir-urges-malays-bumiputeras-to-work-harder-as-opposition-stages-racial-rally>
- Bowie, N. (2019). *Fifty years on, fateful race riots still haunt Malaysia*. Tersedia di Asia Times: <https://asiatimes.com/2019/05/fifty-years-on-fateful-race-riots-still-haunt-malaysia/> Diakses 20 Desember, 2021
- Chin, J. (2018). *Commentary: So much for a new Malaysia.*, Tersedia di Channel News Asia: <https://www.channelnewsasia.com/commentary/malaysia-anti-icerd-white-shirts-rally-race-religion-politics-913281> Diakses 28 Desember, 2021
- Chin, J. (2021). *Affirmative Action at 50 in Malaysia*. Tersedia di Tablet: <https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/affirmative-action-malaysia-nep-james-chin>
- Chin, J. (2021). *Affirmative Action at 50 in Malaysia: A brief history and evaluation of the NEP, the never ending policy*. Tersedia di Tablet: <https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/affirmative-action-malaysia-nep-james-chin>
- Chin, J. (2022). *Racism Towards the Chinese Minority in Malaysia: Political Islam and Institutional Barriers*. Tersedia di Wiley Online Library: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.13145>
- Factbook, C. W. (2021). *Malaysia Demographics Profile*. Tersedia di Index Mundi: [https://www.indexmundi.com/malaysia/demographics_profile.html#:~:text=33%2C519%2C406%20\(July%202021%20est.\)&text=Bumiputera%2062.5%25%20\(Malays%20and%20indigenous,9.8%25%20\(2019%20est](https://www.indexmundi.com/malaysia/demographics_profile.html#:~:text=33%2C519%2C406%20(July%202021%20est.)&text=Bumiputera%2062.5%25%20(Malays%20and%20indigenous,9.8%25%20(2019%20est) Diakses tanggal 23 Januari 2023
- Hamid, N. (2018). *New Straits Times*. Retrieved from *Umno Youth: ICERD's ratification will abolish Malay, Bumiputera special rights* Tersedia di: <https://www.nst.com.my/news/nation/2018/11/427306/umno-youth-icerds-ratification-will-abolish-malay-bumiputera-special>
- Hwok Aun, L. (2018). *Muddying the waters of the Icerd debate*. Tersedia di Malaysiakini: <https://www.malaysiakini.com/news/451507>
- Mayberry, K. (2018). *Malaysia: Malays rally amid worries over government 'weakness'*. Tersedia di Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2018/12/8/malaysia-malays-rally-amid-worries-over-government-weakness>
- Paulsen, E. (2018). *On Icerd, Article 153 and resetting race relations and discrimination*. Tersedia di Fortify Rights: <https://www.fortifyrights.org/mly-inv->

oped-2018-11-29/ Diakses tanggal 9
Januari 2023

UNHRC. (n.d.). *Basic Facts About the UPR*.
Tersedia di OHCHR:
[https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts#:~:text=The%20UPR%20will%20assess%20the,4\)%20voluntary%20pledges%20and%20commitments](https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts#:~:text=The%20UPR%20will%20assess%20the,4)%20voluntary%20pledges%20and%20commitments)